



PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025





BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi pedoman perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

b. bahwa sesuai hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja dan pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, telah dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025.**

Pasal 1

- (1) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2025.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun 2025 dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 26 Juni 2025

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 26 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIAN TO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,



AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

Perubahan Renja Tahun 2025 ini disusun dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen dan pencapaian target kinerja yang diharapkan. Maksud disusunnya Perubahan Renja adalah untuk menyesuaikan Renja dengan dinamika dan perubahan yang terjadi setelah Renja awal disusun. Dokumen Perubahan Renja disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, serta untuk memastikan sinkronisasi dengan arah kebijakan pembangunan daerah terkini, baik karena faktor internal maupun eksternal.

Dengan disusunnya dokumen ini diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen dapat lebih terarah dan lebih akuntabel.

Kebumen, 26 Juni 2025



KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEBUMEN

SUKAMTO S.Sos, M.T
Pemula Utama Muda (IV/c)
NIP. 196912241990011001

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPERIDA	
NAMA	TANDA TANGAN
Krima Karmila	
Budi Jatmiko	

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB 2	6
EVALUASI RENCANA KERJA S.D. TRIWULAN I TA 2025	6
2.1 Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2025	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen	20
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	24
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	26
BAB 3.	28
RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	28
BAB 4	43
PENUTUP	43

DAFTAR TABEL

Tabel 2 1. Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah s/d
Triwulan I..... 7

Tabel 2 2. Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen..... 23

Tabel 2 4. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 27

Tabel 3. 1. Rancangan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas
Komunikasi dan Informatika Tahun 2025.....29

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perumusan perubahan Renja Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen Tahun 2025 juga merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Untuk menampung semua perubahan penjabaran yang terjadi pada APBD Tahun 2025, usulan pergeseran dan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) serta mendasari hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 sampai dengan triwulan pertama maka perlu dilakukan perubahan terhadap Renja Dinas Kominfo Tahun 2025. Perubahan Renja ini diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai upaya mengakselerasi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kominfo Tahun 2025.

Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Kominfo Tahun 2025 pada dasarnya mengikuti mekanisme yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, khususnya terkait dengan penyesuaian terhadap kondisi dan dinamika pelaksanaan program/kegiatan. Proses penyusunan Renja dimulai dengan identifikasi dan evaluasi pelaksanaan Renja Awal, perubahan kebijakan dan prioritas, dan penyesuaian program dan kegiatan.

Keterkaitan Renja PD dengan dokumen RKPD dan Renstra PD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam Renja PD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra PD dan RKPD. Renja PD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD, Renstra PD, dan RPJMD, bagi RKA PD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);
13. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 122 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
14. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen

Tahun 2025;

15. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 32 Tahun 2025 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja ini adalah sebagai pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen dalam merencanakan dan menganggarkan kegiatan sesuai Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran Dinas.

Tujuan dari disusunnya Perubahan Renja Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a) Menyesuaikan capaian target dengan kondisi aktual dan perkembangan lingkungan strategis;
- b) Menyelaraskan perubahan program/kegiatan dengan kebijakan Perubahan RKPD Tahun 2025;
- c) Menjamin konsistensi perencanaan dan penganggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang; mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja, proses penyusunan Perubahan Renja, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja PD Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2 Landasan Hukum; memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.
- 1.3 Maksud dan Tujuan; memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja.
- 1.4 Sistematika Penulisan; menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB 2. EVALUASI RENCANA KERJA S.D. TRIWULAN I TA 2025

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan triwulan I tahun 2025 dan Capaian Renstra PD;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD;
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD;
- 2.4 Review Usulan Program dan Kegiatan PD;
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB 3. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Berisikan uraian mengenai program kegiatan dan pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan disertai indikator kinerja program maupun indikator kinerja dan pendanaan indikatif yang dibutuhkan.

BAB 4. PENUTUP

BAB 2

EVALUASI RENCANA KERJA S.D. TRIWULAN I TA 2025

2.1 Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2025

Salah satu alasan dilakukannya perubahan terhadap Renja Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen Tahun 2025 berdasar pada hasil evaluasi hasil kinerja pelaksanaan Renja Tahun 2025 hingga triwulan I. Evaluasi dilakukan terhadap capaian Indikator Kinerja Utama Urusan, Indikator Kinerja Utama Program, Indikator Kinerja Utama Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama Subkegiatan.

Evaluasi kinerja Dinas Kominfo masih mendasari target Renstra Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Hal ini dikarenakan dilakukan dengan membandingkan realisasi dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan triwulan I Tahun 2025 dengan target Renja Tahun 2025 dan target sampai dengan akhir tahun/periode Renstra yaitu Tahun 2026.

Secara umum masih terdapat capaian indikator yang belum dapat diukur sampai dengan triwulan I. Kondisi tersebut antara lain terdapat indikator yang diukur tahunan dan belum dapat dilakukan pengukuran sampai dengan triwulan I, sehingga perhitungan indikator tersebut mengacu pada tahun sebelumnya. Berikut dijabarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 sampai dengan triwulan I tahun 2025.

Tabel 2 1. Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah s/d Triwulan I

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kominfo) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program/ kegiatan renja tahun 2025(tahu n n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi s.d. TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
2	16				URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Indeks SPBE	3,60	3,70	3,50	4,07	116,28	3,55	4,07	113
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	100	100	100	100	25	71
2	16	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	60 dokumen	30 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	100	10 dokumen	42 dokumen	70
2	16	01	2.01	01	Sub-Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	42 dokumen	21 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100	7 dokumen	30 dokumen	67
2	16	01	2.01	07	Sub-Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	18 dokumen	9 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	3 dokumen	12 dokumen	67
2	16	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	51 bulan	71

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kominfo) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program/ kegiatan renja tahun 2025(tahu n n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi s.d. TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
2	16	01	2.02	01	Sub-Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	51 bulan	71
2	16	01	2.02	03	Sub-Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD	Jumlah bulan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	51 bulan	71
2	16	01	2.02		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8 kegiatan	3 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	5 kegiatan	62
2	16	01	2.02	10	Sub-Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang- undangan	0,00	6 media	3 media	3 media	100	3 media	1 media	0,00
2	16	01	2.02	11	Sub-Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Orang yang didiklat	132 orang	31 orang	31 orang	31 orang	100	0	0	23

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kominfo) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program/ kegiatan renja tahun 2025(tahu n n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi s.d. TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
2	16	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	51 bulan	71
2	16	01	2.06	01	Sub-Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	51 bulan	71
2	16	01	2.06	04	Sub-Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	51 bulan	71
2	16	01	2.06	05	Sub-Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	51 bulan	71
2	16	01	2.06	06	Sub-Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	51 bulan	71
2	16	01	2.06	07	Sub-Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	51 bulan	71

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kominfo) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program/ kegiatan renja tahun 2025(tahu n n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi s.d. TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
2	16	01	2.06	09	Sub-Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan Penyediaan Bahan/Material	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	51 bulan	71
2	16	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ururan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ururan Pemerintah Daerah	182 unit	72 unit	7 unit	7 unit	100	24 unit	103 unit	57
2	16	01	2.07	05	Sub-Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah unit Pengadaan Mebel	51 unit	41 unit	0	0	0	0	41 unit	80
2	16	01	2.07	06	Sub-Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	129 unit	28 unit	4 unit	4 unit	100	24 unit	56 unit	43
2	16	01	2.07	10	Sub-Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	0	3 unit	3 unit	3 unit	100	0	6 unit	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kominfo) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program/ kegiatan renja tahun 2025(tahu n n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi s.d. TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
					Lainnya									
2	16	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	51 bulan	71
2	16	01	2.08	01	Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	51 bulan	71
2	16	01	2.08	02	Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	51 bulan	71
2	16	01	2.08	04	Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	51 bulan	71
2	16	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Bulan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	51 bulan	71

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kominfo) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program/ kegiatan renja tahun 2025(tahu n n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi s.d. TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
					Daerah									
2	16	01	2.09	02	Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	51 bulan	71
2	16	01	2.09	05	Sub-Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Bulan Pemeliharaan Mebel	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	51 bulan	71
2	16	01	2.09	06	Sub-Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	51 bulan	71
2	16	01	2.09	09	Sub-Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100	3 Unit	3 Unit	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kominfo) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program/ kegiatan renja tahun 2025(tahu n n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi s.d. TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks PPID	43,14	26,47	30,20	32,16	106,49	34,51	32,16	75
2	16	02	2.01		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah PPID OPD dan desa dalam kondisi baik	220 OPD dan desa	135 OPD dan desa	154 OPD dan desa	164 OPD dan desa	106,49	176 OPD dan desa	176 OPD dan desa	75
2	16	02	2.01	05	Sub-Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Jam siar Ratih Tv dan Radio In Fm	67.890 Jam	22.630 Jam	11.315 Jam	11.315 Jam	100	9.516 Jam	36.773 Jam	54
2	16	02	2.01	06	Sub-Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	jumlah PPID OPD dan desa dalam kondisi baik	220 OPD dan desa	135 OPD dan desa	154 OPD dan desa	164 OPD dan desa	106,49	176 OPD dan desa	176 OPD dan desa	75
2	16	02	2.01	12	Sub-Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	jumlah pertemuan LKM dan FK Metra	58 Kali	20 Kali	5 Kali	5 Kali	100	4 Kali	27 Kali	46

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kominfo) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program/ kegiatan renja tahun 2025(tahu n n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi s.d. TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Nilai Domain Layanan SPBE dalam Penilaian Indeks SPBE	3,87	4,39	3,86	4,44	115,02	3,86	4,44	115
2	16	03	2.01		Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah paket layanan infrastruktur	98 paket	16 paket	8 paket	8 paket	100	9 paket	33 paket	34
2	16	03	2.01	03	Sub-Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah paket layanan infrastruktur	98 paket	16 paket	8 paket	8 paket	100	9 paket	33 paket	34
2	16	03	2.02		Kegiatan Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi pendukung SPBE	574 aplikasi	192 aplikasi	96 aplikasi	100 aplikasi	104,17	100 aplikasi	392 aplikasi	68

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kominfo) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program/ kegiatan renja tahun 2025(tahu n n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi s.d. TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
2	16	03	2.02	07	Sub-Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi pendukung SPBE	574 aplikasi	192 aplikasi	100 aplikasi	100 aplikasi	100	100 aplikasi	392 aplikasi	68
2	16	03	2.02	10	Sub-Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Desa yang Dilatih Sistem Informasi Desa	400 desa	100 desa	50 desa	50 desa	100%	50 orang	200 orang	50
2	20				URUSAN STATISTIK	Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	83
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGAR AAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kominfo) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program/ kegiatan renja tahun 2025(tahu n n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi s.d. TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
2	20	02	2.10		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen statistik sektoral yang tersedia	6 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	4 dokumen	50
2	20	02	2.10	01	Sub-Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah OPD yang mengisi website Satu Data sesuai SOP	158 OPD	54 OPD	24 OPD	24 OPD	100	24 OPD	102 OPD	65
2	21				URUSAN PERSANDIAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan	100%	70,65%	83,48	94,35	113,02	100	94,35	94

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kominfo) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program/ kegiatan renja tahun 2025(tahu n n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi s.d. TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase desa dan kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan	100	39,56	61,30	94,35	113,02	94,35	94,35	94
2	21	02	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa dan Kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan	460 desa/ kelurahan	179 desa/ kelurahan	282 desa/ kelurahan	434 desa/ kelurahan	115,25	384 desa/ kelurahan	434 desa/ kelurahan	94
2	21	02	2.01	03	Sub-Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Desa dan Kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan	460 desa/ kelurahan	179 desa/ kelurahan	282 desa/ kelurahan	434 desa/ kelurahan	115,25	384 desa/ kelurahan	434 desa/ kelurahan	94

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kominfo) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program/ kegiatan renja tahun 2025(tahu n n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi s.d. TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
2	21	02	2.01	04	Sub-Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa dan Kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan	460 desa/ kelurahan	179 desa/ kelurahan	282 desa/ kelurahan	434 desa/ kelurahan	115,25	384 desa/ kelurahan	434 desa/ kelurahan	94

Capaian kinerja Renja Tahun 2025 menunjukkan urusan komunikasi dan informatika dengan 1 indikator telah mencapai 100%. Hal yang sama juga ditunjukkan dengan capaian program dengan 2 indikator telah mencapai 100%.

Capaian kinerja Renstra sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menunjukkan urusan komunikasi dan informatika dengan 1 indikator telah mencapai 100%. Sementara itu capaian program dengan 2 indikator menunjukkan 1 indikator program telah mencapai 100%. Sedangkan capaian 1 indikator program yang lainnya yaitu indeks PPID baru mencapai 80%. Permasalahan yang terjadi diantaranya kesadaran PD tentang keterbukaan informasi publik belum tinggi, aplikasi berbasis *website* PPID belum di-*update* serta penyedia informasi dan dokumen belum dianggap sebagai sesuatu yang penting. Upaya yang dilakukan diantaranya adanya lomba desa dan pemeringkatan *website* PD ikut meningkatkan kesadaran untuk meng-*upload* dokumen di *website* masing-masing PD maupun desa. Secara *agregat* rata-rata capaian program pada Renstra sampai dengan triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 90%. Untuk itu ke depannya perlu terus dioptimalkan digitalisasi layanan publik.

Capaian kinerja Renja Tahun 2025 menunjukkan urusan statistik dengan 1 indikator telah mencapai 100%. Hal yang sama juga ditunjukkan dengan capaian program dengan 1 indikator telah mencapai 100%. Seperti halnya capaian pada Renja, capaian kinerja Renstra sampai dengan triwulan I Tahun 2025 juga menunjukkan urusan statistik dengan 1 indikator telah mencapai 100%. Hal yang sama juga ditunjukkan dengan capaian program dengan 1 indikator telah mencapai 100%.

Capaian kinerja Renja Tahun 2025 menunjukkan urusan persandian dengan 1 indikator telah mencapai 94,35%. Hal yang sama juga ditunjukkan dengan capaian program dengan 1 indikator telah mencapai 94,35%. Dari 460 desa dan kelurahan di wilayah Kabupaten Kebumen, masih terdapat 43 desa yang belum menggunakan persandian dalam komunikasi diantaranya tanda tangan elektronik. Hal ini diantaranya dikarenakan tanda tangan elektronik harus mendapatkan verifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk itu upaya pengoptimalan terus dilakukan dan diharapkan pada Tahun 2026 seluruh desa dan kelurahan di wilayah Kabupaten Kebumen telah

menerapkan tanda tangan elektronik.

Capaian kinerja Renstra sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menunjukkan urusan persandian dengan 1 indikator telah mencapai 94,35%. Hal yang sama juga ditunjukkan dengan capaian program dengan 1 indikator telah mencapai 94,35%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen

Secara umum pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen dibagi ke dalam 3 urusan.

a. Urusan Komunikasi dan Informatika

Indikator kinerja utama urusan komunikasi dan informasi adalah Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal.

Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Adapun tahapan evaluasi tersebut antara lain Penilaian Mandiri oleh K/L/D/I (Asesor Internal), Penilaian Dokumen, Penilaian Interview, Penilaian Visitasi, Harmonisasi, Pengumuman Final oleh Asesor Eksternal Kementerian PANRB.

b. Urusan Statistik

Indikator kinerja utama urusan statistik adalah persentase

OPD yang mengisi *website* Satu Data sesuai SOP, dengan rumus (jumlah OPD yang mengisi *website* Satu Data sesuai SOP / jumlah OPD) x 100%. Data statistik yang ada di *website* satu data merupakan produk data dari Perangkat Daerah terkait yang telah dilakukan validasi secara internal. Data yang dipublikasikan baik melalui *website* satu data dan buku statistik sektoral merupakan data yang sudah divalidasi sehingga terjamin kebenarannya. Data dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah dalam pengambilan kebijakan maupun masyarakat yang mempunyai kebutuhan akan penggunaan data.

c. **Urusan Persandian**

Indikator kinerja utama urusan persandian adalah persentase desa dan kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi Desa/Kelurahan, dengan rumus (jumlah kelurahan dan desa yang telah menggunakan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan / jumlah kelurahan dan desa) x 100%. Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi adalah tanda tangan yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi secara digital menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) Indonesia yang diakui oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tanda tangan elektronik di Kabupaten Kebumen telah diimplementasikan sampai kepala Desa dan Kelurahan, yang dilakukan melalui kerjasama dengan Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber, dan Sandi Negara sebagai PSrE. Manfaat utama dari penggunaan tanda tangan elektronik bagi kepala Desa dan Kelurahan adalah percepatan layanan administrasi Desa dan Kelurahan melalui aplikasi Desa dan Kelurahan Online Kebumen. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam proses administratif, tetapi juga memberikan kemudahan akses kepada masyarakat Desa dan Kelurahan dalam mengajukan berbagai permohonan dan mendapatkan pelayanan secara digital. Dengan demikian, implementasi tanda tangan elektronik menjadi langkah progresif untuk meningkatkan pelayanan publik di tingkat Desa dan Kelurahan dengan memanfaatkan teknologi digital secara optimal.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen dari tahun 2023, 2024 dan 2025 serta proyeksi pencapaian kinerja tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2 2. Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Indeks SPBE (Urusan Komunikasi dan Informatika)	N/A	N/A	3,45	3,50	3,55	3,60	3,70	4,07	4,08	4,09	Realisasi Capaian Tahun 2025 merupakan realisasi s.d TW I
2.	Persentase OPD yang mengisi website satu data sesuai SOP (Urusan Statistik)	N/A	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Realisasi Capaian Tahun 2025 merupakan realisasi s.d TW I
3.	Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa/Kelurahan (Urusan Persandian)	N/A	N/A	61,30%	83,48%	100,00%	100,00%	100,00%	61,30%	100,00%	100,00%	Realisasi Capaian Tahun 2025 merupakan realisasi s.d TW I

Capaian kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan tingkat capaian urusan komunikasi dan informatika dengan 1 indikator telah mencapai 100%, urusan statistik dengan 1 indikator telah mencapai 100%, dan urusan persandian dengan 1 indikator baru mencapai 94,35%.

Realisasi keuangan Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebesar Rp1.394.318.504,- atau sebesar 14,37% dari total anggaran Rp9.701.091.000,-. Masih rendahnya realisasi belanja disebabkan karena pembayaran dilakukan setelah triwulan I sesuai anggaran kas.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja 2025 tidak bisa lepas dari isu- isu strategis yang muncul dan berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, analisis gambaran kinerja, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I Tahun 2025, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra. Untuk itu, dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan isu-isu tugas dan fungsi yang berkembang.

- a. Urusan Komunikasi dan Informatika
 - a) Keterbatasan akses internet masyarakat. Keterbatasan akses disebabkan oleh jaringan TIK belum optimal;
 - b) Peningkatan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi dan keterpaduan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal.
- b. Urusan Statistik
 - Kebutuhan data yang *realibel* dan akuntabel. Kebutuhan data disebabkan karena masyarakat belum memperoleh data statistik sektoral yang *valid, update, dan reliable*.
- c. Urusan Persandian
 - Tuntutan keamanan data disebabkan karena masih banyaknya celah keamanan sistem informasi pemerintah;
 - Peningkatan pelayanan publik di tingkat desa dengan memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi adalah tanda tangan yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi secara digital menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) Indonesia yang diakui oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. TTE di Kab. Kebumen telah diimplementasikan sampai kepala desa, yang dilakukan melalui kerjasama dengan Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber, dan Sandi Negara sebagai PSrE. Manfaat utama dari penggunaan TTE bagi kepala desa adalah percepatan layanan administrasi desa

melalui aplikasi Desa Online Kebumen. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam proses administratif, tetapi juga memberikan kemudahan akses kepada masyarakat desa dalam mengajukan berbagai permohonan dan mendapatkan pelayanan secara digital.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya senantiasa memperhatikan usulan dari berbagai pihak termasuk dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah. Pada Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen usulan dari *stakeholder* sebagian besar ditujukan kepada Perangkat Daerah sesuai bidang peruntukannya, yakni Bidang Pengembangan Informatika berupa penyediaan jaringan internet di pedesaan dan Bidang Informasi Komunikasi Publik berupa diseminasi informasi dengan memaksimalkan media yang sudah ada. Usulan Forum PD akan di jadikan bahan perumusan perencanaan RKPD Tahun 2025.

Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen selain bersumber dari hasil

penelaahan isu-isu strategis (teknokratis) juga berasal dari usulan para pemangku kepentingan, dalam hal ini pokok-pokok pikiran anggota DPRD (politis). Untuk Tahun Anggaran 2025 tidak ada usulan atau pokok-pokok pikiran anggota DPRD Kebumen.

Tabel 2 3. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

BAB 3. RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Renja Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pembangunan, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta perkembangan kebijakan nasional, provinsi, dan daerah. Untuk menampung perubahan penjabaran yang terjadi pada APBD Tahun 2025, usulan pergeseran dan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) serta mendasari hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 sampai dengan triwulan pertama Tahun 2025 maka perlu dilakukan perubahan terhadap Renja Tahun 2025. Perubahan Renja ini diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai upaya mengakselerasi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2025 terdiri dari 5 program, 11 kegiatan dan 27 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp12.074.940.872,-. Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3. 1. Rancangan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							Keterangan
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Rasio	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				10.445.611.334	10.179.263.000	12.074.940.872	1.629.329.538	16%	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				10.445.611.334	10.179.263.000	12.074.940.872	1.629.329.538	16%	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				10.294.611.334	10.028.263.000	11.826.507.872	1.531.896.538	15%	
02.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	4.708.328.334	4.445.772.000	5.039.736.872	331.408.538	7%	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	10 dokumen	10 dokumen	38.000.000	38.000.000	33.640.000	-4.360.000	-11%	
2.16.01.2.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	29.000.000	29.000.000	25.996.000	-3.004.000	-10%	efisiensi belanja
2.16.01.2.01.00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	9.000.000	9.000.000	7.644.000	-1.356.000	-15%	efisiensi belanja
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	3.686.438.334	3.147.910.000	3.097.870.000	-588.568.334	-16%	
2.16.01.2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	3.664.680.334	3.126.152.000	3.078.501.000	-586.179.334	-16%	
2.16.01.2.02.00 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	21.758.000	21.758.000	19.369.000	-2.389.000	-11%	
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian	-	-	-	0	270.572.000	270.572.000	270.572.000	0%	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							Keterangan
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Rasio	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Perangkat Daerah									
2.16.01.2.05.00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan	-	0 Orang	0	270.572.000	270.572.000	270.572.000	0%	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	78.000.000	78.000.000	59.001.000	-18.999.000	-24%	
2.16.01.2.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0%	efisiensi belanja
2.16.01.2.06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	21.000.000	21.000.000	18.900.000	-2.100.000	-10%	efisiensi belanja
2.16.01.2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	9.000.000	9.000.000	8.100.000	-900.000	-10%	efisiensi belanja
2.16.01.2.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0%	
2.16.01.2.06.00 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	10.000.000	10.000.000	9.001.000	-999.000	-10%	efisiensi belanja
2.16.01.2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	30.000.000	30.000.000	15.000.000	-15.000.000	-50%	efisiensi belanja
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10 Unit	10 Unit	140.000.000	140.000.000	761.862.872	621.862.872	444%	
2.16.01.2.07.00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	140.000.000	140.000.000	761.862.872	621.862.872	444%	peralatan pendukung medsos

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							Keterangan
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Rasio	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	12 Bulan	502.890.000	508.290.000	553.791.000	50.901.000	10%	
2.16.01.2.08.00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	1.494.000	1.494.000	1.494.000	0	0%	
2.16.01.2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	400.000.000	400.000.000	450.000.000	50.000.000	13%	
2.16.01.2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	101.396.000	106.796.000	102.297.000	901.000	1%	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan	263.000.000	263.000.000	263.000.000	0	0%	
2.16.01.2.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	33 Unit	90.000.000	90.000.000	90.000.000	0	0%	
2.16.01.2.09.00 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	34 Unit	34 Unit	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0%	
2.16.01.2.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	80 Unit	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0%	
2.16.01.2.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	120.000.000	120.000.000	120.000.000	0	0%	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							Keterangan
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Rasio	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks PPID	0,3882	0,3882	2.749.887.000	2.746.095.000	4.019.901.000	1.270.014.000	46%	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah PPID OPD dan desa dalam kondisi baik	198 OPD dan desa	198 OPD dan desa	2.749.887.000	2.746.095.000	4.019.901.000	1.270.014.000	46%	
2.16.02.2.01.00 15	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	9 Komunitas	9 Komunitas	87.000.000	87.000.000	62.903.000	-24.097.000	-28%	efisiensi belanja
2.16.02.2.01.00 17	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	25 Permoh onan	25 Permoh onan	1.209.723.000	1.059.723.000	811.624.000	-398.099.000	-33%	publikasi Kebumen Festival
2.16.02.2.01.00 21	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	2 Media	2 Media	1.453.164.000	1.599.372.000	3.145.374.000	1.692.210.000	116%	- publikasi Kebumen Festival - penyelenggara an acara "Suara Parlemen"
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Nilai Domain Layanan SPBE dalam Penilaian Indeks SPBE	3,86 nilai	3,86 nilai	2.836.396.000	2.836.396.000	2.766.870.000	-69.526.000	-2%	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi pendukung SPBE	100 Aplikasi	100 Aplikasi	2.836.396.000	2.836.396.000	2.766.870.000	-69.526.000	-2%	
2.16.03.2.02.00 20	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	100 Aplikasi	100 Aplikasi	366.396.000	366.396.000	223.382.000	-143.014.000	-39%	Anggaran digeser ke subkegiatan penyediaan layanan keamanan informasi untuk

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							Keterangan
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Rasio	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										resertifikasi ISO SMKI 27001
2.16.03.2.02.00 24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	50 PD	50 PD	2.470.000.000	2.470.000.000	2.543.488.000	73.488.000	3%	Belanja modal peralatan jaringan
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				45.000.000	45.000.000	33.746.000	-11.254.000	-25%	
02.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP	100 %	100 %	45.000.000	45.000.000	33.746.000	-11.254.000	-25%	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen statistik sektoral yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000	45.000.000	33.746.000	-11.254.000	-25%	
2.20.02.2.01.00 10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000	45.000.000	33.746.000	-11.254.000	-25%	efisiensi belanja
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				106.000.000	106.000.000	214.687.000	108.687.000	103%	
02.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan	1	1	106.000.000	106.000.000	214.687.000	108.687.000	103%	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa dan Kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	106.000.000	106.000.000	214.687.000	108.687.000	103%	
2.21.02.2.01.00 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi	1 Laporan	1 Laporan	12.000.000	12.000.000	3.535.000	-8.465.000	-71%	efisiensi belanja

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							Keterangan
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Rasio	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik								
2.21.02.2.01.00 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	50 PD	50 PD	94.000.000	94.000.000	211.152.000	117.152.000	125%	resertifikasi ISO SMKI 27001
	JUMLAH				10.445.611.334	10.179.263.000	12.074.940.872	1.629.329.538	16%	

Bila dibandingkan dengan RKPD murni, pagu anggaran Perubahan RKPD tahun 2025 naik sebesar Rp1.629.329.638,- atau sekitar 16%. Secara umum, pagu anggaran murni per sub kegiatan mengalami penyesuaian anggaran karena adanya efisiensi belanja sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dan adanya pergeseran anggaran ke sub kegiatan lain untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai upaya mengakselerasi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen Tahun 2025. Pagu perubahan anggaran Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen pada lima (5) program, sebelas (11) kegiatan dan dua puluh tujuh (27) sub kegiatan, adalah sebagai berikut:

I. NON URUSAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Anggaran Rp38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) perlu dilakukan penyesuaian pada rekening belanja bahan cetak dan honorarium narasumber sebesar Rp4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga pagu sub kegiatan menjadi Rp33.640.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

1.1.2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Anggaran Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) perlu dilakukan penyesuaian pada rekening belanja lembur sebesar Rp1.356.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) sehingga pagu sub kegiatan menjadi Rp7.644.000,- (tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Anggaran Rp3.664.680.334,- (tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) perlu

dilakukan penyesuaian pada rekening belanja gaji pokok, belanja tunjangan fungsional dan belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp586.179.334,- (lima ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga pagu sub kegiatan menjadi Rp3.078.501.000,- (tiga milyar tujuh puluh delapan juta lima ratus satu ribu rupiah).

1.2.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah. Anggaran Rp21.758.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) perlu dilakukan penyesuaian pada rekening belanja bahan cetak sebesar Rp2.389.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga pagu sub kegiatan menjadi Rp19.369.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.3.1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan. Anggaran tidak mengalami penyesuaian, pagu sub kegiatan tetap Rp270.572.000,- (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Sumber dana berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT).

1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Anggaran tidak mengalami penyesuaian, pagu sub kegiatan tetap Rp4.000.000,- (empat juta rupiah).

1.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Anggaran Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) perlu dilakukan penyesuaian pada rekening belanja makan dan minuman rapat sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sehingga pagu sub kegiatan menjadi Rp18.900.000,-

(delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah).

- 1.4.3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. Anggaran Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) perlu dilakukan penyesuaian pada rekening belanja bahan cetak sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga pagu sub kegiatan menjadi Rp8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah).
- 1.4.4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan. Anggaran tidak mengalami penyesuaian, pagu sub kegiatan tetap Rp4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 1.4.5. SubKegiatan Penyediaan Bahan/Material. Anggaran Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) perlu dilakukan penyesuaian pada rekening belanja alat tulis kantor, kertas dan bahan komputer sebesar Rp999.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga pagu sub kegiatan menjadi Rp9.001.000,- (sembilan juta seribu rupiah).
- 1.4.6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah. Anggaran Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) perlu dilakukan penyesuaian pada rekening belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga pagu sub kegiatan menjadi Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Anggaran Rp140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah) perlu dilakukan penyesuaian pada rekening belanja modal peralatan studio audio, video dan film sebesar Rp621.862.872,- (enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) untuk pendukung kegiatan : media sosial sehingga pagu sub kegiatan menjadi Rp761.862.872,- (tujuh ratus

enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).

1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Anggaran tidak mengalami penyesuaian, pagu sub kegiatan tetap Rp1.494.000,-

1.6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Anggaran Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) perlu dilakukan penyesuaian pada rekening belanja tagihan listrik sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga pagu sub kegiatan menjadi Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

1.6.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Anggaran tidak mengalami penyesuaian, pagu sub kegiatan tetap Rp263.000.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah).

1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Anggaran tidak mengalami penyesuaian, pagu sub kegiatan tetap Rp90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).

1.7.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel. Anggaran tidak mengalami penyesuaian, pagu sub kegiatan tetap Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

1.7.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Anggaran tidak mengalami penyesuaian, pagu sub kegiatan tetap Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

1.7.4. SubKegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Anggaran tidak mengalami penyesuaian, pagu sub kegiatan tetap Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

II. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

2.1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2.1.1. Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat. Anggaran Rp87.000.000,-(delapan puluh tujuh juta rupiah) perlu dilakukan penyesuaian pada rekening belanja ATK, belanja makan dan minuman rapat, dan belanja perjalanan dinas sebesar Rp24.097.000,- (dua puluh empat juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga pagu sub kegiatan menjadi Rp62.903.000,- (enam puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu rupiah).

2.1.2. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik. Anggaran Rp1.209.723.000,-(satu milyar dua ratus sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) perlu dilakukan penyesuaian pada rekening belanja ATK, belanja makan minum, belanja lembur, belanja jasa penyelenggaraa acara, belanja jasa honor nara sumber dan belanja perjalanan dinas sebesar Rp398.099.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga pagu sub kegiatan menjadi Rp811.624.000,- (delapan ratus sebelas juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah).

2.1.3. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik. Anggaran Rp1.453.164.000,-(satu milyar empat ratus lima puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) perlu dilakukan penyesuaian pada rekening belanja makan dan minuman rapat, belanja internet dan belanja jasa honor nara sumber dan moderator sebesar Rp1.692.210.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) untuk penyelenggaraan acara “Suara Parlemen” di Kebumen TV dan Radio IN FM sehingga pagu sub kegiatan menjadi

3.145.374.000,- (tiga milyar seratus empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

3.1. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3.1.1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah. Anggaran Rp2.470.000.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) perlu dilakukan penyesuaian pada rekening belanja modal komputer dan belanja modal peralatan jaringan sebesar Rp73.488.000,- (tujuh puluh tiga empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk kegiatan pemeliharaan sehingga pagu sub kegiatan menjadi Rp2.543.488.000,- (dua milyar lima ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

3.2.2. Sub Kegiatan Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE. Anggaran Rp366.396.000,- (tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) perlu dilakukan penyesuaian pada rekening jasa tenaga informasi sebesar Rp143.014.000,- (seratus empat puluh tiga juta empat belas ribu rupiah) untuk digeser ke sub kegiatan penyediaan layanan keamanan informasi yang akan digunakan untuk resertifikasi ISO SMKI sehingga pagu sub kegiatan menjadi Rp223.382.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

III. URUSAN STATISTIK

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

4.1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

4.1.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral Anggaran

Rp45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) perlu dilakukan penyesuaian pada rekening belanja BBM, belanja ATK, belanja makan minum dan belanja perjalanan dinas sebesar Rp11.254.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) sehingga pagu sub kegiatan menjadi Rp33.746.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).

IV. URUSAN PERSANDIAN

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

5.1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

5.1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik. Anggaran Rp12.000.000,-(dua belas juta rupiah) perlu dilakukan penyesuaian pada rekening belanja makan minum rapat dan belanja perjalanan dinas sebesar Rp8.465.000,- (delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) sehingga pagu sub kegiatan menjadi Rp3.535.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

5.1.2. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran Rp94.000.000,-(Sembilan puluh empat juta rupiah) perlu dilakukan penyesuaian pada rekening belanja jasa kontribusi asosiasi untuk resertifikasi ISO SMKI sebesar Rp117.152.000,- (seratus tujuhbelas juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) sehingga pagu sub kegiatan menjadi Rp211.152.000,- (dua ratus sebelas juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).

Perubahan anggaran rencana kerja Dinas kominfo Kabupaten Kebumen tahun 2025 yang signifikan terdapat pada:

a. Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Pagu murni

- Rp140.000.000,- dilakukan penyesuaian anggaran sebesar Rp621.862.872,- menjadi Rp761.862.872,- atau naik 444%. Tambahan tersebut untuk belanja modal peralatan studio, audio, video, dan film untuk keperluan Medsos
- b. Subkegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik. Pagu murni Rp1.453.164.000,- dilakukan penyesuaian anggaran sebesar Rp1.692.210.000,- menjadi Rp3.145.374.000,- atau naik 116%. Tambahan tersebut untuk penyelenggaraan acara “Suara Parlemen” senilai 1,5M dan publikasi Kebumen Festival Rp500.000.000,-. Suara Parlemen merupakan program siaran khusus di kanal Kebumen TV dan Radio IN FM (media televisi dan radio lokal milik Pemkab Kebumen yang dikelola Dinas Kominfo) yang berisi *talkshow*/dialog dengan pimpinan dan anggota DPRD terkait kebijakan daerah dan publikasi kegiatan DPRD Kabupaten Kebumen Tujuannya adalah untuk a) Menyampaikan informasi transparan tentang fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD; b) Menjadi jembatan komunikasi antara DPRD dan masyarakat; dan c) Memberikan ruang bagi publik untuk mengetahui hasil rapat paripurna, pembahasan perda, kegiatan reses, hingga agenda kerja DPRD lainnya;
 - c. Subkegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pagu murni Rp2.470.000.000,- mengalami penyesuaian anggaran sebesar Rp73.488.000,- menjadi Rp2.543.488.000,- atau naik 3%. Tambahan tersebut untuk belanja modal peralatan jaringan pendukung *maintenance data center*;
 - d. Sukegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah. Pagu murni Rp 366.396.000,- mengalami penyesuaian anggaran sebesar Rp143.014.000,- menjadi Rp 223.382.000,- atau berkurang 39%. Pengurangan pagu sebesar Rp143.014.000,- dialihkan ke subkegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk resertifikasi ISO SMKI 27001:2022.

BAB 4

PENUTUP

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, juga perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk periode 1 (satu) tahun. Sasaran program dan kegiatan Pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 telah diselaraskan dengan sasaran yang tercantum dalam dokumen Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah 2024-2026, sehingga turut berkontribusi teradap capaian sasaran Pembangunan Nasional dan Provinsi.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pembangunan, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta perkembangan kebijakan nasional, provinsi, dan daerah. Dokumen ini menjadi pedoman operasional tahunan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai instrumen untuk mewujudkan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) didasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tahapan:

1. Persiapan Penyusunan;
2. Penyusunan Rancangan Awal;
3. Penyusunan Rancangan;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir, dan
6. Penetapan.

Selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.

Kebumen, 26 Juni 2025

KEPALA DINAS

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN KEBUMEN



SUKAMTO, S.Sos, M.T

Pemimpin Utama Muda (IV/c)

NIP. 19691224 199001 1 001

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. KEBUMEN TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								10.445.611.334,00	10.179.263.000,00	12.074.940.872,00	1.629.329.538,00						12.567.372.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							10.445.611.334,00	10.179.263.000,00	12.074.940.872,00	1.629.329.538,00							12.567.372.000,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							10.294.611.334,00	10.028.263.000,00	11.826.507.872,00	1.531.896.538,00							12.148.372.000,00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	4.708.328.334,00	4.445.772.000,00	5.039.736.872,00	746.489.666,00							5.454.818.000,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun				10 Dokumen	10 Dokumen	38.000.000,00	38.000.000,00	33.640.000,00	-4.360.000,00			-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Kominfo		65.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	29.000.000,00	29.000.000,00	25.996.000,00	-3.004.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	9.000.000,00	9.000.000,00	7.644.000,00	-1.356.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	3.686.438.334,00	3.147.910.000,00	3.097.870.000,00	-588.568.334,00			-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Diskominfo		3.890.246.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/b ulan	28 Orang/b ulan	3.664.680.334,00	3.126.152.000,00	3.078.501.000,00	-586.179.334,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			3.740.246.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	21.758.000,00	21.758.000,00	19.369.000,00	-2.389.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	270.572.000,00	270.572.000,00	270.572.000,00			-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		205.572.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				-	0 Orang	0,00	270.572.000,00	270.572.000,00	270.572.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			205.572.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				12 Bulan	12 Bulan	78.000.000,00	78.000.000,00	59.001.000,00	-18.999.000,00			-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Diskominfo		204.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	4 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			6.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	4 Paket	21.000.000,00	21.000.000,00	18.900.000,00	-2.100.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			45.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				4 Paket	4 Paket	9.000.000,00	9.000.000,00	8.100.000,00	-900.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			18.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	9.001.000,00	-999.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			70.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				10 Unit	10 Unit	140.000.000,00	140.000.000,00	761.862.872,00	621.862.872,00			-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Diskominfo		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	140.000.000,00	140.000.000,00	761.862.872,00	621.862.872,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan				12 Bulan	12 Bulan	502.890.000,00	508.290.000,00	553.791.000,00	50.901.000,00			-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Diskominfo		652.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.494.000,00	1.494.000,00	1.494.000,00	0,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	400.000.000,00	400.000.000,00	450.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	101.396.000,00	106.796.000,00	102.297.000,00	901.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				12 Bulan	12 Bulan	263.000.000,00	263.000.000,00	263.000.000,00	0,00			-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		288.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				33 Unit	33 Unit	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			140.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				34 Unit	34 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			3.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				80 Unit	80 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			120.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks PPID				38,82 %	38,82 %	2.749.887.000,00	2.746.095.000,00	4.019.901.000,00	652.556.000,00							3.402.443.000,00		
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah PPID OPD dan desa dalam kondisi baik				198 OPD dan desa	198 OPD dan desa	2.749.887.000,00	2.746.095.000,00	4.019.901.000,00	1.270.014.000,00			-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Masyarakat, Perangkat Daerah		3.402.443.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat																			
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				9 Komunitas	9 Komunitas	87.000.000,00	87.000.000,00	62.903.000,00	-24.097.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik																			
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				25 Permoh onan	25 Permoh onan	1.209.723.000,00	1.059.723.000,00	811.624.000,00	-398.099.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			1.252.443.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																			
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				2 Media	2 Media	1.453.164.000,00	1.599.372.000,00	3.145.374.000,00	1.692.210.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			2.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Nilai Domain Layanan SPBE dalam Penilaian Indeks SPBE				3,86 nilai	3,86 nilai	2.836.396.000,00	2.836.396.000,00	2.766.870.000,00	454.715.000,00							3.291.111.000,00		
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi pendukung SPBE				100 Aplikasi	100 Aplikasi	2.836.396.000,00	2.836.396.000,00	2.766.870.000,00	-69.526.000,00			-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Diskominfo, OPD, Masyarakat		3.291.111.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah																		
			<i>Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah</i>				100 Aplikasi	100 Aplikasi	366.396.000,00	366.396.000,00	223.382.000,00	-143.014.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			791.111.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota																		
			<i>Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota</i>				50 Perangkat Daerah	50 Perangkat Daerah	2.470.000.000,00	2.470.000.000,00	2.543.488.000,00	73.488.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			2.500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							45.000.000,00	45.000.000,00	33.746.000,00	-11.254.000,00							50.000.000,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP				100 100 % %	100 100 % %	45.000.000,00	45.000.000,00	33.746.000,00	5.000.000,00							50.000.000,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah dokumen statistik sektoral yang tersedia</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	33.746.000,00	-11.254.000,00			-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Kominfo, Perangkat Daerah, Masyarakat		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia																		
			<i>Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	33.746.000,00	-11.254.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							106.000.000,00	106.000.000,00	214.687.000,00	108.687.000,00							369.000.000,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan				100 %	100 %	106.000.000,00	106.000.000,00	214.687.000,00	263.000.000,00							369.000.000,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Desa dan Kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan</i>				100 %	100 %	106.000.000,00	106.000.000,00	214.687.000,00	108.687.000,00			-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Dinas Kominfo, Perangkat Daerah, Masyarakat		369.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																		
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</i>				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	3.535.000,00	-8.465.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			56.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi</i>				50 Perangkat Daerah	50 Perangkat Daerah	94.000.000,00	94.000.000,00	211.152.000,00	117.152.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			313.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		J U M L A H							10.445.611.334,00	10.179.263.000,00	12.074.940.872,00	-86.009.642.937,00						12.567.372.000,00		